



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**REALISASI TARGET DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BERDASARKAN  
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI RIAU NOMOR 30  
TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENYALURAN  
DANA BAGI HASIL PAJAK KEPADA PEMERINTAH  
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI RIAU**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S1)  
Di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

**ROBBY SUANDI**

**NIM :11527100070**

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**2019**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**

Skripsi ini berjudul *"REALISASI TARGET DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI RIAU NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI RIAU"*.

Nama : ROBBY SUANDI

NIM : 11527100070

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk di ujikan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Juli 2019

Pembimbing Skripsi

**Dr. Maghfirah, MA**  
NIP.197410252003121002



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul, "REALISASI TARGET DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI RIAU NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI RIAU" yang ditulis oleh :

Nama : ROBBY SUANDI  
NIM : 11527100070  
Program Studi : ILMU HUKUM

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/ Tanggal : Kamis / 12 September 2019  
Waktu : 14.00 Wib  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Oktober 2019  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Drs. Heri Sunandar, MCL**

Sekretaris  
**Roni Kurniawan, SH., MH**

Penguji 1  
**Lovelly Dwina Dahan, SH., MH**

Penguji 2  
**Hj. Nuraini Sahu, SH., MH**

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**  
NIP. 19580712 198603 1 005

UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ROBBY SUANDI**  
 NIM : 11527100070  
 Tempat / Tanggal Lahir : Pasar Teluk Kelasa, 04 Desember 1996  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim RIAU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul **“Realisasi Target Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau”**, adalah benar karya saya sendiri atau bukan plagiat dari hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 08 Oktober 2019

Yang Membuat Pernyataan

**ROBBY SUANDI**  
 NIM: 11527100070

UIN SUSKA RIAU



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Robby Suandi (2019): *Realisasi Target Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau.***

Adapun penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh realisasi target dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor di kabupaten indragiri hilir yang tidak mencapai target dan tidak berjalan secara optimal sesuai dengan peraturan gubernur nomor 30 tahun 2017. Dilihat dari fakta yang terjadi di lapangan bahwasanya realisasi dari dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor tersebut tidak mencapai target yang telah ditetapkan oleh badan pendapatan daerah tersebut dan tidak berjalan secara optimal sesuai dengan peraturan gubernur tersebut. Padahal dana dari bagi hasil tersebut di gunakan untuk pembangunan daerah. Akibat dari tidak tercapai-Nya target dari dana yang telah di salurkan mengakibatkan terhambatnya pembangunan dari daerah tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana realisasi target dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor di kabupaten Indragiri hilir berdasarkan peraturan gubernur provinsi riau nomor 30 tahun 2017 tentang tata cara penyaluran dana bagi hasil pajak kepada pemerintah kabupaten/kota se-provinsi riau, dan apa saja faktor penghambat tidak tercapainya realisasi dari target dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor di kabupaten Indragiri hilir.

Metode dari penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu yang dilakukan langsung turun kelapangan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di badan pendapatan daerah kabupaten Indragiri Hilir. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, seperti teori pemerintahan daerah, teori pendapatan asli daerah, teori perpajakan, teori dana perimbangan, dan perimbangan keuangan didaerah.

Dari hasil penelitian yang diketahui secara keseluruhan bahwa realisasi dari dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor tersebut tidak mencapai target yang telah ditetapkan oleh badan pendapatan daerah kabupaten Indragiri hilir dan tidak berjalan secara optimal sesuai dengan peraturan gubernur nomor 30 tahun 2017. Sedangkan faktor penghambat tidak tercapai-Nya realisasi dari dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor tersebut yang target-Nya telah ditetapkan oleh badan pendapatan daerah kabupaten Indragiri hilir adalah dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, kurang transparan atau keterbukaan bagi wajib pajak, faktor ekonomi yang menurun, kurangnya sosialisasi dari instansi terkait, dan tidak terdatanya kendaraan yang rusak.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat taufik dan hidayah-Nya, sehingga atas kasih sayang-Nya penulis sudah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **“Realisasi Target Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau”**.

Shalawat dan salam tak lupa terucapkan kepada baginda Rasulullah Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, yang telah menjadi tauladan bagi umat manusia. Penulis pun sadar tanpa dukungan dari lingkungan sekitar yang memberikan motivasi serta bimbingan dari berbagai pihak, sulit kiranya menyelesaikan skripsi ini. Karenanya, dari lubuk hati yang paling dalam penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak dan terutama kepada kedua orang tua tercinta yang telah melimpahkan segala kasih dan sayang yang tiada akhir, atas pengorbanannya yang tiada pamrih, nasihat dan doanya yang berguna untuk memotivasi penulis dalam menyusun skripsi ini segera selesai.

Pada kesempatan penelitian ini pula, penulis menyampaikan dengan tulus ucapan terima kasih kepada:

Teristimewa Kepada Kedua Orang Tua Penulis, Ayahanda Nurdindan Ibunda Haryati yang telah mencurahkan segenap kasih dan sayang, beserta do'a yang tak pernah putus selalu dikirimkan kepada Penulis. Segenap dukungan, nasehat, motivasi dan pengorbanan yang tidak pernah bisa dibandingkan dan dibalas dengan apapun, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin., S.Ag, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Firdaus., SH, MH, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr. H. Maghfirah., MA, selaku Pembimbing Penulis yang telah memberikan bimbingan dan masukan yang terbaik kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Bapak Muslim., S.Ag, SH, M.Hum, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Ibu Lysa Anggraini., SH, MH, selaku Penasehat Akademis Penulis selama kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

8. Seluruh Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

9. Seluruh Pegawai dan Karyawan Pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

10. Ibu Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Kasubbid – Kasubbid Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, yang telah banyak membantu, memberikan informasi beserta ilmunya kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Sahabat-sahabat Ilmu Hukum 2, Hukum Tata Negara 4, teman-teman seperjuangan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Teman-teman KKN Desa Pulau Palas Angkatan XVII Tahun 2018, terimakasih untuk pengalaman dan kebersamaan yang berharga selama KKN, dan teman-teman yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah banyak membantu dan memberi semangat kepada Penulis.

Akhirnya, Penulis hanya dapat berharap semoga Skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi Penulis dan khususnya para pembaca umumnya serta bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepada semua yang telah memberikan dukungan, semangat, waktu dan pikirannya, penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pekanbaru, 30 Agustus 2019

Robby Suandi  
NIM.11527100070

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
 <b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	15
 <b>BAB II      GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Deskripsi Umum Badan Pendapatan Daerah Indragiri Hilir .....	18
B. Visi Dan Misi Badan Pendapatan Daerah Indragiri Hilir ..	23
C. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Indragiri Hilir .....	23
D. Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Indragiri Hilir ...	27
E. Strategi Dan Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Indragiri Hilir .....	29
 <b>BAB III      TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pemerintahan Daerah .....	32
B. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	36
C. Pajak.....	46
D. Hukum Pajak .....	48
E. Pajak Daerah .....	48
F. Fungsi Pajak .....	51
G. Sistem Pemungutan Pajak .....	51
H. Dana Perimbangan .....	54
I. Perimbangan Keuangan Di Daerah .....	55
 <b>BAB IV      HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Realisasi Target Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau.....	61

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Faktor Penghambat Tidak Tercapainya Target Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Indragiri Hilir .....	74
---	----

**BAB V**

**PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**



UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

Tabel I.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014-2018 .....	8
Tabel I.2	Populasi Dan Sampel.....	13
Tabel III.1	Pembagian Pendapatan Pajak Provinsi.....	56
Tabel IV.1	Daftar Target Dan Realisasi Penerimaan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Pajak Kendaraan Bermotor.....	64
Tabel IV.2	Proporsi Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Kepada Kabupaten/Kota.....	70
Tabel IV.3	Rekap Penetapan Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Riau Kepada Kabupaten/Kota Indragiri Hilir Triwulan I Dan IV Tahun 2017 .....	72

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, ini berarti bahwa segala bentuk penyelenggaraan bernegara didasarkan kepada hukum-hukum yang berlaku.<sup>1</sup> Dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional, dibutuhkan anggaran pendapatan dan belanja negara yang salah satunya bersumber dari pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan tertinggi negara. Pemungutan pajak digunakan untuk membiayai semua pengeluaran yang dikeluarkan guna mewujudkan pembangunan nasional.

Hal ini sesuai dengan tujuan negara yang dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat yang berbunyi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial.<sup>2</sup> Dari uraian tersebut tampak bahwa negara memerlukan dana untuk kepentingan rakyat.

Dasar hukum yang mengatur tentang pengenaan pajak tercantum pada pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi segala pajak untuk keperluan negara harus berdasarkan undang-undang.<sup>3</sup> Ketentuan ini mengandung asas legalitas yang meletakkan kewenangan pada negara untuk memungut pajak kalau negara membutuhkannya, tetapi dengan syarat harus

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat (3).

<sup>2</sup> Wirawan B. Ilyas, Richart Burton, *Hukum Pajak*, Jakarta : Salemba Empat, 2013, h. 5.

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 23A.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan undang-undang.<sup>4</sup> Pajak secara umum dapat diartikan sebagai iuran wajib rakyat kepada negara dengan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang nantinya akan diperuntukkan untuk kepentingan umum sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan manfaat secara langsung.

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara harus mempunyai kekuatan memaksa, dan uang pajak tersebut harus digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan.<sup>5</sup>

Ditinjau dari pengelolaannya, pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat, dalam hal ini oleh presiden melalui menteri keuangan dengan pelaksanaannya berada pada direktoral jenderal pajak. Pajak pusat antara lain terdiri dari :

1. Pajak penghasilan
2. Pajak pertambahan nilai
3. Pajak penjualan barang mewah
4. Pajak bumi dan bangunan
5. Pajak perolehan tanah dan bangunan
6. Bea materai
7. Fiskal luar negeri.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Muhammad Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014, h. 5.

<sup>5</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, h. 1.

<sup>6</sup> Djoko Mulyono, *Hukum Pajak*, Yogyakarta : Andi, 2010, h. 9.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dikelola dan difungsikan pemerintah daerah dalam hal ini kepala daerah gubernur, bupati atau walikota. Pajak menurut pasal 1 angka (10) undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyebutkan pajak daerah adalah kontribusi wajib bagi yang terutang oleh pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>7</sup>

Secara umum pajak merupakan sumber pembiayaan yang paling besar bagi negara. Fungsi pajak ada dua yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi mengatur *regulerend*. Fungsi *budgetair* merupakan fungsi utama pajak dan fungsi fiskal yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.<sup>8</sup> Sedangkan fungsi mengatur *regulerend* yaitu pajak sebagai alat mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.<sup>9</sup> Fungsi mengatur artinya fungsi pajak yang dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, dan sebagai fungsi tambahan, fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama dan dipakai sebagai alat kebijakan.

<sup>7</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

<sup>8</sup> Abu Samah, *Memahami Hukum Pajak di Indonesia*, Pekanbaru : Uin Suska, 2016, h. 7.

<sup>9</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta : Andi, 2009, h. 2.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber penerimaan daerah provinsi yang berasal dari pajak adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dari sekian banyak pajak daerah, salah satu jenis pajak yang sumber pendapatannya cukup besar adalah Pajak Kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor merupakan objek pajak bagi provinsi Riau yang memberikan kontribusi cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena hampir semua masyarakat membutuhkan dan mempunyai kendaraan bermotor, kendaraan bermotor dipandang penting untuk membantu dalam kelancaran transportasi bagi kegiatan masyarakat luas.

Dana bagi hasil (DBH) merupakan hak daerah atas pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara yang dihasilkan dari masing-masing daerah, yang besarnya ditentukan atas daerah penghasil yang didasarkan atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Contoh dana bagi hasil yang bersumber dari pajak Provinsi adalah dana bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor.

Dana bagi hasil pajak daerah yang selanjutnya disebut dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari realisasi penerimaan pajak daerah berupa Pajak Kendaraan Bermotor yang dialokasikan dalam APBD untuk kabupaten/kota dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>

Pemanfaatan dana bagi hasil sendiri adalah amanat undang-undang sebagai dana perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah atau Provinsi

---

<sup>10</sup> Pasal 1 ayat (10) Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 30 Tahun 2017.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan Kabupaten untuk menata dan mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan kebijakan otonomi daerah yang diperlakukan oleh Pemerintah Pusat agar Pemerintah Daerah dapat lebih mandiri dan tertata dalam mengelola daerahnya. Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, menyatakan Otonomi Daerah adalah hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mengurus rumah tangga daerah sebaik-baiknya, maka daerah memerlukan sumber-sumber keuangan untuk pembiayaan pembangunan yang sangat besar. Pasal 285 UU No. 23 Tahun 2014 menyatakan Sumber Pendapatan Daerah tersebut terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi :
  - a. Pajak Daerah
  - b. Retribusi Daerah
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2. Pendapatan Transfer, meliputi :
  - a. Transfer Pemerintah Pusat
  - b. Transfer antardaerah
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.<sup>11</sup>

Pendapatan daerah sebagai sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang

---

<sup>11</sup> Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperlukan untuk penyelenggaraan Pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan. PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah perundang-undangan.

Di provinsi Riau terdapat peraturan yang mengatur tentang perpajakan yaitu peraturan daerah provinsi nomor 8 tahun 2011 tentang pajak daerah. Pada peraturan daerah (perda) ini ada beberapa jenis pajak yang diatur yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak air permukaan. Menurut pasal 1 angka (12) pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor pada pasal tersebut ialah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor.<sup>12</sup> Pada pasal 9 angka (1) menyebutkan pajak kendaraan bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua

---

<sup>12</sup> Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan di Indonesia Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016, h. 93.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.<sup>13</sup>

Sistem pemungutan pajak kendaraan bermotordilakukan dikantor SAMSAT (Sistem Administrasi Satu Atap). Dikantor tersebut terdapat tiga instansi yang terlibat dalam penanganan pajak kendaraan bermotor. Ketiga instansi tersebut adalah kepolisian, dinas pendapatan daerah dan asuransi (jasa raharja).<sup>14</sup> Pada wilayah provinsi Riau terdapat satu kantor dinas pendapatan daerah yang mengakumulasikan pajak kendaraan bermotor disetiap daerah kabupaten/kota. Untuk memudahkan pelayanan, gubernur selaku kepala daerah menetapkan Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) disetiap kabupaten/kota. Dikabupaten Indragiri Hilir terdapat tiga UPT yaitu pada kantor SAMSAT Tembilahan, kantor SAMSAT Guntung, dan kantor SAMSAT Kotabaru.

Pada tahun 2017 data DISPENDA (Dinas Pendapatan Daerah) provinsi Riau menyebutkan bahwa ada sebanyak 11.701 jumlah kendaraan sepeda motor yang terdaftar dan hanya sekitar 8123 yang memenuhi kewajiban membayar pajak artinya masih ada sekitar 3578 kendaraan yang belum melaksanakan kewajibannya.<sup>15</sup> Beberapa sumber media elektronik juga mengabarkan bahwa masyarakat masih kesulitan dalam membayar pajak kendaraan bermotornya di kantor SAMSAT Tembilahan.

Pendapatan bagi hasil pajak provinsi kabupaten Indragiri hilir tahun 2014 sampai dengan 2018 menunjukkan jumlah yang besar bahkan lebih besar

<sup>13</sup> Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

<sup>14</sup> Azhari Aziz Samudra, *Op. Cit.*, h. 99.

<sup>15</sup> <http://riau.bps.go.id>.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari pada pajak daerah yang dipungut di Kabupaten Indragiri Hilir. Pendapatan bagi hasil pajak provinsi yang diterima kabupaten Indragiri hilir dalam kurun waktu 2014-2018 cenderung menurun dan hanya terjadi satu kali peningkatan pada tahun 2014. Pendapatan bagi hasil pajak provinsi kabupaten Indragiri hilir tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel 1.

**Tabel I.1**  
**Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Kabupaten Indragiri Hilir**  
**Tahun 2014-2018**

Tahun	Jumlah (Rupiah)
2014	18.534.464.421.64
2015	12.933.004.953.51
2016	10.599.320.362.99
2017	5.249.091.382.17
2018	5.601.003.105.45

Sumber : Laporan Realisasi Penerimaan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014-2018

Besarnya pendapatan bagi hasil pajak provinsi yang diterima setiap tahunnya akan berdampak pada pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hilir terlebih pada pengalokasian khusus hasil pendapatan pajak atau *Earmaking*. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai target dan realisasi pendapatan bagi hasil pajak provinsi yaitu pajak kendaraan bermotor terhadap peningkatan pembangunan di kabupaten Indragiri hilir dalam kurun waktu yang telah ditentukan dengan mengangkat judul ”**Realisasi Target Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau**”.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan serta mengingat keterbatasan kemampuan dan dana yang tersedia dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya pembatasan masalah, adapun batasan masalah yang diteliti adalah mengenai Realisasi Target Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Indragiri Hilir yang Tidak Mencapai Target dan Tidak Berjalan Secara Optimal Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah tersebut diatas. Maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana realisasi target dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor di kabupaten indragiri hilir berdasarkan peraturan gubernur provinsi riau nomor 30 tahun 2017 tentang tata cara penyaluran dana bagi hasil pajak kepada pemerintah kabupaten/kota se-provinsi riau?
2. Apa saja faktor penghambat tidak tercapainya realisasi dari target dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor di kabupaten indragiri hilir?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui realisasi target dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor di kabupaten indragiri hilir berdasarkan peraturan gubernur

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

provinsi riau nomor 30 tahun 2017 tentang tata cara penyaluran dana bagi hasil pajak kepada pemerintah kabupaten/kota se-provinsi riau.

- b. Untuk mengetahui faktor penghambat tidak tercapainya realisasi dari target dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor di kabupaten indragiri hilir.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan dan sebagai pedoman bagi penulis dalam menerapkan ilmu pengetahuan.
- b. Sebagai bahan masukan, kajian dan informasi lebih lanjut bagi penulis lainnya yang ingin membahas kembali masalah ini dimasa yang akan datang.
- c. Penelitian ini berguna untuk melengkapi tugas akhir dan sekaligus syarat untuk meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

## Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan segala permasalahan. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, h. 18.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. Jenis dan sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris, metode penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat.<sup>17</sup> Penelitian hukum sosiologis atau empiris, terdiri dari penelitian identifikasi hukum dan efektifitas hukum. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam badan hukum atau badan pemerintah. Yang mana penulis langsung kelapangan untuk melakukan penelitian untuk memperoleh data.

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun alasan penelitian ini dilaksanakan karena ada permasalahan terhadap realisasi target dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor di kabupaten Indragiri hilir yang tidak mencapai target dan tidak berjalan secara optimal sesuai dengan peraturan gubernur nomor 30 tahun 2017.

### 3. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjeknya adalah lembaga pemerintahan di kawasan Pemerintahan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Sedangkan objek penelitian ini adalah tentang Realisasi Target Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Indragiri Hilir.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers, 2001, h. 13-14.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Populasi dan Sampel

##### a. Populasi

Populasi unit yang diteliti, yaitu dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, atau tempat dengan ciri atau sifat yang sama.<sup>18</sup> Dan populasi adalah, yaitu keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian.<sup>19</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang berjumlah 4 orang terdiri dari yaitu 1 Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan dan Staf sebanyak 3 orang, Bidang Pembukuan, Pelaporan, Verifikasi dan Bagi Hasil Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang berjumlah 4 orang terdiri dari yaitu 1 Kepala Bidang Pembukuan, Pelaporan, Verifikasi dan Bagi Hasil dan staf sebanyak 3 orang, dan Kepala Samsat/Upt Kecamatan Tembilahan Kota sebanyak 1 orang.

##### b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.<sup>20</sup> Atau bagian populasi yang dianggap mewakili populasinya.<sup>21</sup> Metode yang digunakan dalam penetapan sampel yaitu dengan *metode purposive sampling* yaitu peneliti menentukan sendiri populasi yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini, yang jelas

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007, h. 118.

<sup>19</sup> Burhan Ashshofah, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2010, h. 79.

<sup>20</sup> Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, h. 119.

<sup>21</sup> Burhan Ashshofah, *Op. Cit.*, h. 79.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat mewakili terhadap populasi yang ada sehingga dapat menjawab pokok permasalahan yang akan peneliti angkat.

Dan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 2 orang yaitu 1 Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan dan Staf 1 orang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, 1 Kepala Bidang Pembukuan, Pelaporan, Verifikasi dan Bagi Hasil dan Staf 1 orang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, dan 1 Kepala Samsat/Upt Kecamatan Tembilahan Kota sebanyak 1 orang.

**Tabel I.2**  
**Tabel Populasi dan Sampel**

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	4	2	50%
2.	Bidang Pembukuan, Pelaporan, Verifikasi dan Bagi Hasil Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	4	2	50%
3.	Kepala Samsat/Upt Kecamatan Tembilahan Kota	1	1	100%
<b>Jumlah</b>		<b>9</b>	<b>5</b>	<b>-</b>

Sumber : Data Olahan Penulis, 2019

#### 5. Sumber Data

Sumber data adalah tempat ditemukannya data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah sumber data primer, yaitu merupakan data yang diperoleh langsung dari observasi, dan wawancara.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data yang dikumpul dalam penelitian ini dapat di golongan menjadi dua, antara lain:

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama,<sup>22</sup> baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, internet dan peraturan perundang-undangan.
- c. Data Tersier, yaitu data yang terdapat dalam kamus umum bahasa Indonesia, kamus istilah hukum belanda, majalah, surat kabar dan internet.

#### 6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Observasi ( Pengamatan )

Observasi yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati.<sup>23</sup> Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung di lapangan, untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek maupun objek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

<sup>22</sup> Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010, h. 30.

<sup>23</sup> Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta : Salemba Humanika, 2010, h. 106.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Wawancara

Wawancara (*interview*) dianggap efektif dalam pengumpulan data primer lapangan. Dianggap efektif karena interviewer dapat bertatap muka langsung dengan responden.<sup>24</sup> Untuk memperoleh data yang akurat dan mendalam mengenai pokok permasalahan dalam penelitian ini.

#### c. Studi Pustaka

Studi pustaka, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>25</sup>

#### 7. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode analisis kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan, yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

#### Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab. Masing-masing bab di perinci lagi menjadi beberapa sub bab yang saling menghubungkan satu sama lainnya. Untuk mempermudah dalam memahami

<sup>24</sup> Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta, 2014, h. 127.

<sup>25</sup> Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011, h. 53.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini penulis memaparkan dalam sistematika penelitian sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang latar belakang masalah mengenai realisasi target dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor di kabupaten Indragiri hilir, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan serta sistematika penulisan.

## **BAB II GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini yang terdiri dari gambaran umum tentang :

- A. Deskripsi Umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
- B. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
- C. Struktur Organisasi.
- D. Uraian Tugas.
- E. Strategi dan Kebijakan.

## **BAB III TINJAUAN PUSTAKA**

Di dalam bab ini membahas tinjauan tentang pemerintahan daerah, pendapatan asli daerah, pajak, hukum pajak, pajak daerah, fungsi pajak, sistem pemungutan pajak, dana perimbangan, dan perimbangan keuangan di daerah.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan penelitian tentang :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- A. Realisasi target dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor di kabupaten indragiri hilir berdasarkan peraturan gubernur provinsi riau nomor 30 tahun 2017 tentang tata cara penyaluran dana bagi hasil pajak kepada pemerintah kabupaten/kota se-provinsi riau.
- B. Faktor penghambat tidak tercapainya target dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor di kabupaten indragiri hilir.

**BAB V PENUTUP**

Merupakan bagian akhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan penelitian.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### Deskripsi Umum Badan Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir

Terbentuknya Kabupaten Indragiri Hilir menurut UU No. 6 tahun 1965 tentang pembentukan Kabupaten / daerah Tingkat II Indragiri Hilir. Setelah dilakukannya berbagai penelitian, yang dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Tanggal 27 April 1965 Nomor 052/5/1965 sebagai Daerah Persiapan Tembilahan Resmi dimekarkan menjadi kabupaten Indragiri Hilir maka diperlukan perkembangan ke depan, oleh karena itu, Pemerintah Daerah mendirikan sebuah kantor yang mengurus masalah pungutan penghasilan daerah yaitu Badan Pendapatan Daerah, yang didirikan pada tahun 1965. Akan tetapi pada masa itu kantor Badan Pendapatan Daerah masih bergabung dengan Bagian Keuangan dan kas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, dan berada dalam satu atap dengan Kantor Bupati Daerah tingkat II Indragiri Hilir.

Dengan kemajuan perkembangan pembangunan dan tuntutan tugas maka Badan Pendapatan Daerah mulai dipisahkan dan mulai berdiri sehingga dibangun kantor tersendiri untuk Badan Pendapatan Daerah yang diperkirakan pada tahun 1977, namun masih dibawah satu atap dengan Kantor Bupati, yaitu di Jalan Gajah Mada No.1 Tembilahan Kota. Dengan memiliki kantor sendiri, otomatis terpisah pula dengan tenaga kerja Pelaksanaan dan Pimpinan Kantor. Pada saat Badan Pendapatan Daerah mulai berdiri sendiri, yang memimpin adalah Bapak Usman Fa'ad.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah lebih kurang lebih 40 tahun, pada pertengahan bulan Juli 2005 Badan Pendapatan berpindah alamat ke Jalan Hang Tuah No. 04 Tembilahan, yaitu di Gedung Inhil Business Centre yang dibangun mulai tahun 2003. Gedung Inhil Business Centre tersebut dibangun dari hasil Penerimaan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sendiri, yaitu Pajak dan Retribusi Daerah maupun dari Dana Bagi Hasil Provinsi maupun Pusat. Gedung Inhil Business Centre tersebut diresmikan pemakaiannya pada 15 Juni 2005 oleh Gubernur Riau, H. MUHAMMAD RUSLI ZAINAL, SE sekaligus diresmikannya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir berada satu atap dengan Badan Perizinan, Penanaman Modal, dan Promosi Daerah (BPPMPD) Kabupaten Indragiri Hilir yang sama-sama ber kantor di Gedung Inhil Business Centre tersebut. Berikut nama-nama yang pernah menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhil :

1. H. Usman Fa'ad
2. Yudha Yahya, B.A.
3. Drs. Alibun Siregar
4. Drs. Jailani Sabrah
5. Drs. Nazaruddin Ahmad
6. Drs. Indra Bangsawan
7. Drs. Said Sarifuddin
8. Drs. Husni Hasan
9. H. Edy Syafwannur, S.E., M.P. (Tmt. 2006 S/D Juni 2009)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Drs. H.A.Rasyid. HZ(Tmt. Juni 2009 s.d. Oktober 2010)

11. H. Fajar Husen, S.H., M.H. (Oktober 2010 s/d Mei 2013)

12. Junaidy, S.Sos., M.Si. (Tmt. Mei 2013 s.d Januari 2015)

13. Ir. H. Saripek, M.P. (Tmt. Januari 2015 s.d Desember 2015)

14. H. Hafitsyah, S.H., M.H. (Pelaksana Tugas Kepala Badan Pendapatan, tmt. September s.d Desember 2015)

15. Drs. H. Aslimuddin (Tmt. 1 Januari 2016 s.d. Desember 2018)

16. Hj. Nurlia, S.E., M.M. (Tmt. Januari 2018 s.d. sekarang).

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah tersebut maka Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir membentuk Struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, termasuk Dinas Pendapatan mengalami perubahan yakni pada Struktur dan Nomenklatur SKPD/OPD Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir menjadi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 13), berlaku pada 1 Januari 2017.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendapatan daerah melaksanakan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas dan masing-masing sekretariat serta bidang adalah sebagai berikut :

Kepala Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah terhadap penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah.

Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkoordinasian dan perumusan kebijakan teknis unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Pendapatan Daerah lingkup bidang Kesekretariatan, Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, Bidang Pembukuan, Pelaporan, Verifikasi dan Bagi Hasil, Bidang Penagihan dan Keberatan,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Bidang Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah, Kelompok Jabatan Fungsional, Unit Pelaksana Teknis Badan ;
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Pendapatan lingkup bidang Kesekretariatan, Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, Bidang Pembukuan, Pelaporan, Verifikasi dan Bagi Hasil, Bidang Penagihan dan Keberatan, Bidang Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan, Kelompok Jabatan Fungsional, Unit Pelaksana Teknis Badan;
  3. Penyelenggaraan kebijakan teknis unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Pendapatan Daerah lingkup bidang Kesekretariatan, Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, Bidang Pembukuan, Pelaporan, Verifikasi dan Bagi Hasil, Bidang Penagihan dan Keberatan, Bidang Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah, Kelompok Jabatan Fungsional, Unit Pelaksana Teknis Badan;
  4. Pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Pendapatan Daerah lingkup bidang Kesekretariatan, Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, Bidang Pembukuan, Pelaporan, Verifikasi dan Bagi Hasil, Bidang Penagihan dan Keberatan, Bidang Pengembangan, Evaluasi Pendapatan Daerah, Kelompok Jabatan Fungsional, Unit Pelaksana Teknis Badan ;
  5. Penyelenggaraan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **Visi dan Misi Badan Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir**

#### 1. Visi

Terwujudnya penerimaan pendapatan asli daerah yang optimal.

#### 2. Misi

- a. Meningkatkan kinerja Aparatur Dinas Pendapatan melalui Pendidikan dan Pelatihan.
- b. Meningkatkan dan mengoptimalkan kelengkapan data serta pengkajian potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui sumber daya alam yang dimiliki.
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- d. Meningkatkan kesejahteraan Aparatur di lingkungan Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir.
- e. Meningkatkan pembinaan dan pelayanan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi daerah secara profesional.
- f. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk kepentingan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- g. Meningkatkan penegakan supremasi hukum baik terhadap aparatur atau wajib pajak atau wajib retribusi.

### **Struktur Organisasi**

1. Kepala Badan.
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
  3. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan terdiri dari:
    - a. Sub Bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah ;
    - b. Sub Bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan, Penilaian PBB dan BPHTB;
    - c. Sub Bidang Perhitungan, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah.
  4. Bidang Pembukuan, Pelaporan, Verifikasi dan Bagi Hasil terdiri dari:
    - a. Sub Bidang Pembukuan
    - b. Sub Bidang Verifikasi dan Pelaporan.
    - c. Sub Bidang Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak.
  5. Bidang Penagihan dan Keberatan terdiri dari:
    - a. Sub Bidang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah serta PAD Lainnya.
    - b. Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB.
    - c. Sub Bidang Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya.
  6. Bidang Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah terdiri dari:
    - a. Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah.
    - b. Sub Bidang Pengembangan Potensi dan Hukum.
    - c. Sub Bidang Pemeriksaan, Penertiban dan Evaluasi.
  7. Kelompok Jabatan Fungsional.
  8. Unit Pelaksana Teknis Badan
    - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Kecamatan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Selanjutnya Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 41 UPT, sebagai berikut :

1. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Tembilahan, wilayah kerja Kecamatan Tembilahan
2. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Tembilahan hulu, wilayah kerja Kecamatan Tembilahan Hulu
3. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Gaung Anak Serka, meliputi wilayah kerja :
  - a. Kecamatan Gaung Anak Serka
  - b. Kecamatan Batang Tuaka
4. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Tanah Merah, meliputi wilayah kerja:
  - a. Kecamatan Tanah Merah
  - b. Kecamatan Enok
5. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Kuala Indragiri, meliputi wilayah kerja :
  - a. Kecamatan Kuala Indragiri
  - b. Kecamatan Concong
6. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Tempuling, meliputi wilayah kerja:
  - a. Kecamatan Tempuling
  - b. Kecamatan Kempas
7. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Reteh, meliputi wilayah kerja :
  - a. Kecamatan Reteh

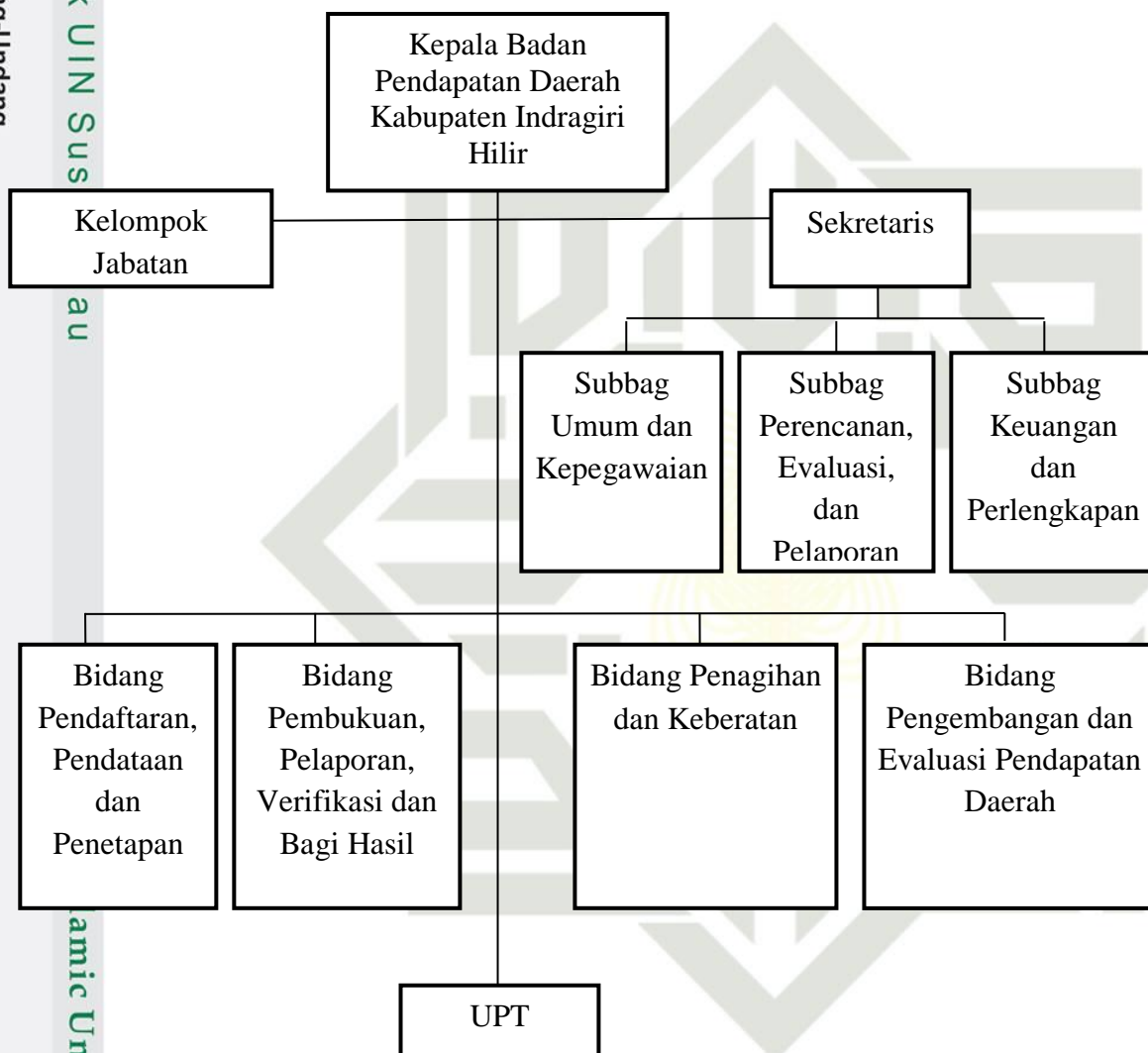
**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kecamatan Sungai Batang
8. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Keritang, wilayah kerja Kecamatan Kecamatan Keritang
9. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Kemuning, wilayah kerja Kecamatan Kecamatan Kemuning
10. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandah, wilayah kerja Kecamatan Mandah
11. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Pelangiran, wilayah kerja Kecamatan Pelangiran
12. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Kateman, meliputi wilayah kerja :
  - a. Kecamatan Kateman
  - b. Kecamatan Teluk Belengkong
13. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Pulau Burung wilayah kerja Kecamatan Pulau Burung
14. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Gaung, wilayah kerja Kecamatan Gaung.



**BAGAN ORGANISASIBADAN PENDAPATAN**  
**DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**  
**BERDASARKAN PERBUP NO. 48 TAHUN 2016**



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Indragiri Hilir : 2018

**Uraian Tugas**

1. Kepala Badan Pendapatan mempunyai tugas memimpin kegiatan Dinas, baik administratif maupun operasional sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan bidang kesekretariatan dalam menyelenggarakan administrasi dan urusan umum, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, perencanaan dan pengendalian.
3. Bidang Dana Perimbangan Bidang Dana Perimbangan mempunyai tugas pokok melaksanakan Pengurusan Dana Perimbangan dari Pusat dan Propinsi berkaitan dengan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak serta Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Bidang Pajak, Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya Bidang Pajak dan Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya mempunyai tugas pokok melaksanakan penatausahaan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya.
5. Bidang Pembukuan dan Pelaporan Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan penatausahaan pembukuan, verifikasi dan pembuatan laporan.
6. Bidang Pendataan, Penetapan dan Keberatan Bidang Pendataan, Penetapan dan Keberatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendataan, penetapan serta penyelesaian keberatan yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas melaksanakan Pengadministrasian terhadap penerimaan Pajak daerah dan Retribusi daerah di wilayah kerja Kecamatan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Strategi dan Kebijakan Badan Pendapatan Daerah

Strategi menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan komprehensif tentang langkah-langkah/upaya-upaya yang diperlukan untuk merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka disusun strategi untuk pencapaian sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

1. Menyiapkan kemampuan profesional Sumber Daya Aparatur agar mampu memberikan pelayanan prima melalui pendidikan dan pelatihan serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai;
2. Melakukan Pengawasan Intern di bidang Pendapatan Daerah dan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan dan penerimaan daerah dengan mendata ulang Objek/Subjek Pajak dan menggali potensi Pajak dan Retribusi Daerah serta intensifikasi Bagi Hasil Provinsi dan Pusat;
3. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan melalui media cetak maupun elektronik, dan sosialisasi dan penyuluhan langsung kepada masyarakat wajib pajak, serta memanfaatkan kemajuan teknologi untuk kemudahan informasi dan pembayaran Pajak Daerah.

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran, adapun kebijakan Dinas Pendapatan/Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah sbb :

1. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi, sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan peningkatan pendapatan
2. Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur yang berkualitas
3. Peningkatan dan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang konprehensif
4. Mendorong kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan penerimaan lainnya
5. Mewujudkan pembangunan yang direncanakan melalui pencapaian penerimaan secara maksimal
6. Membangun kerjasama dengan instansi terkait dan pihak lain yang berhubungan.

Berhasil tidaknya suatu rencana strategis akan sangat tergantung jelas dan tidaknya arah kebijakan yang ditetapkan, arah kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas pendapatan / Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dengan memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di Bidang Pendapatan Daerah sehingga mampu menggali dan mengembangkan asset dan potensi yang ada dengan ditunjang sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan pengelolaan pendapatan daerah.

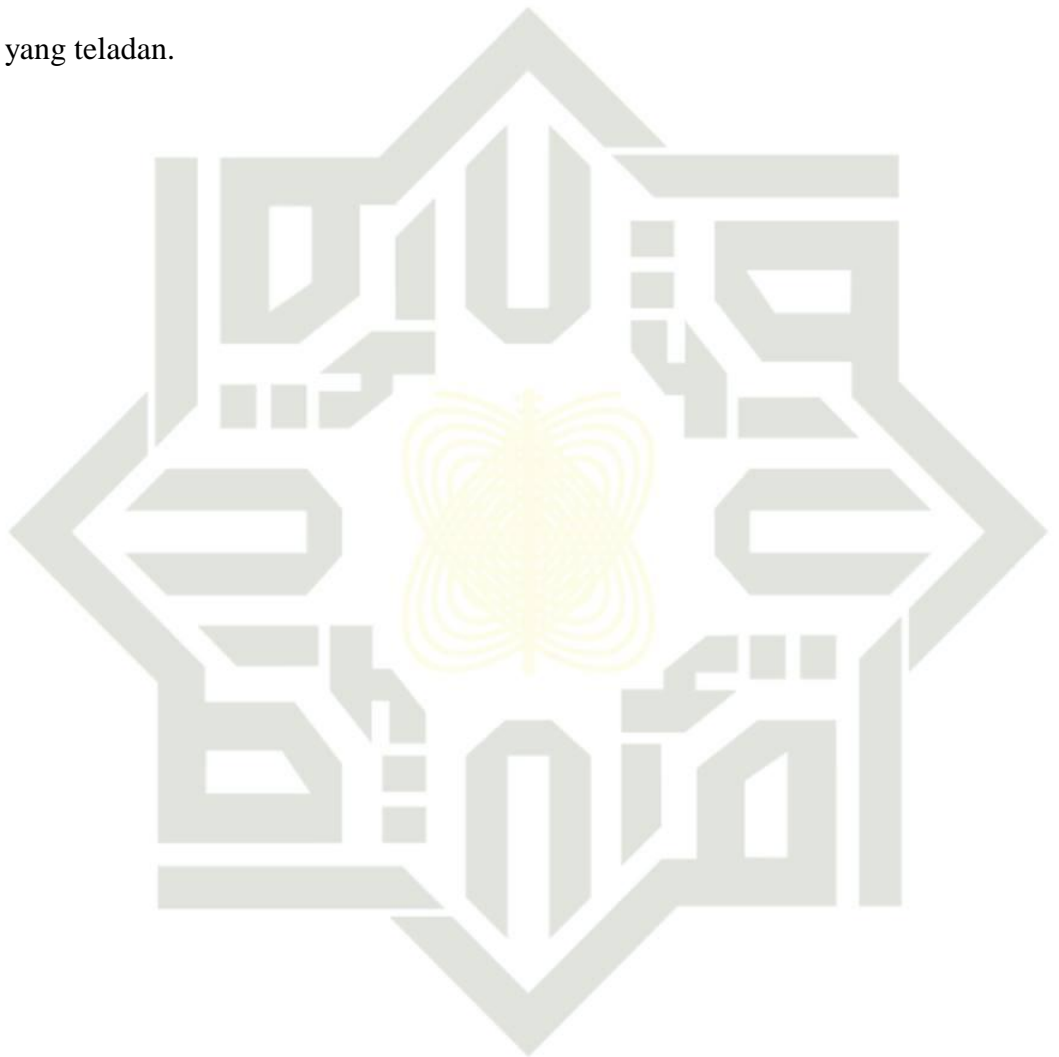
2. Peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan daerah dengan
3. Peningkatan Penyuluhan dan Sosialisasi, Pembinaan dan Penertiban terhadap Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah, serta pemberian *reward* (penghargaan) kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah yang teladan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN PUSTAKA

#### Pemerintahan Daerah

Melalui perjuangan bangsa dari kurungan penjajah pada tahun 1945, akhirnya Indonesia mampu memproklamirkan diri menjadi negara yang merdeka, bersatu dan berdaulat menjadi Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Hatta sejak saat itu Pemerintah Negara Republik Indonesia Terbentuk. Setelah pemerintah pusat terbentuk maka segala unsur yang diperlukan dalam penyelenggaraan negara ikut pula dibentuk, tidak terlepas adalah pembentukan pemerintahan daerah dimana pemerintahan daerah merupakan bagian penting yang tak terpisahkan dari fungsi penyelenggaraan negara sebagai amanat dari Undang-Undang, yaitu adanya pembagian kewenangan dalam menyelenggarakan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah.

Luasnya daerah-daerah di Indonesia menjadi terbagi-bagi atas beberapa provinsi, kabupaten, serta kota. Daerah-daerah tersebut memiliki pemerintahan daerah untuk mempermudah kinerja pemerintah pusat, dalam hal pembagian kekuasaan terhadap daerahnya digunakan suatu asas yang dinamakan asas otonomi sesuai yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>26</sup>

Pembagian wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah menandakan adanya hubungan pemerintah pusat dan daerah.

<sup>26</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat (2).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagaimana hubungan itu idealnya terjadi adalah merupakan sebuah keinginan dan proses pencarian bentuk yang sesuai dengan cita-cita dan keinginan rakyat Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perjalanan sejarahnya, hubungan pemerintah pusat dan daerah telah melalui berbagai model dan bentuk sesuai regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang yang mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah.

Pengertian pemerintah dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah : (1) sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya, (2) sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan, (3) penguasa suatu negara (bagian negara) negara dimisalkan pengemudi negara, negara memerlukan yang kuat dan bijaksana, (4) badan tertinggi yang memerintah suatu negara seperti kabinet.<sup>27</sup>

Pemerintah merupakan pemangku jabatan pemerintahan untuk menjalankan wewenang atau kekuasaan yang melekat pada lingkungan jabatan-jabatan. Penggunaan kata government (pemerintah) dalam bahasa Inggris juga sering menimbulkan kesalahpahaman. Banyak orang tidak menyadari bahwa kata tersebut mengandung arti luas dan sempit.<sup>28</sup>

Pemerintah dalam arti luas adalah pemerintah di bidang legislatif, yudikatif, dan sebagainya. Pemerintah dalam arti sempit adalah pemangku

<sup>27</sup> <http://kbbi.web.id/perintah>, diakses tanggal 11 Juli 2019.

<sup>28</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, h. 210.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jabatan sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif atau secara lebih sempit pemerintah sebagai penyelenggara administrasi negara.

Pengertian pemerintahan daerah di Indonesia mengalami perubahan dari waktu ke waktu seiring dengan berlakunya dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah sebab seperti diketahui bahwa dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia sudah berganti-ganti sesuai dengan perkembangan dan perjalanan pemerintahan itu sendiri sejak kemerdekaan.

Pengertian pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi. Sedangkan pengertian pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.

Desentralisasi menurut Hoogerwarf merupakan pengakuan atau penyerahan wewenang oleh badan-badan publik yang lebih tinggi kepada badan-badan publik yang lebih rendah kedudukannya untuk secara mandiri dan berdasarkan kepentingan sendiri mengambil keputusan di bidang pengaturan dan di bidang pemerintahan.<sup>29</sup>

Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai pemerintah daerah, bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan

---

<sup>29</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015, h. 294.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikotadan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, pengertian pemerintah daerah adalah penyeenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.<sup>30</sup>

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat daerah yang merupakan bagian dari pemerintah pusat.<sup>31</sup> Pemerintah daerah merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara. Sebutan ini digunakan untuk melengkapi lembaga-lembaga tingkat negara-bangsa, yang disebut pemerintah pusat, pemerintah nasional atau bila perlu pemerintah federal. Pemerintah daerah hanya beroperasi menggunakan kekuasaan yang diberikan Undang-Undang atau arahan tingkat pemerintah yang lebih tinggi dan masing-masing negara memiliki sejenis pemerintahan daerah yang berbeda dari satu negara ke negara lain.

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

<sup>31</sup> *Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam Pasal 18 UUD 1945 telah mengatur pembagian wilayah negara kesatuan RI menjadi daerah provinsi yang kemudian dibagi lagi menjadi daerah kabupaten/kota yang mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Ketentuan tersebut merupakan Amandemen kedua yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000. Sebelum Amandemen, ketentuan Pasal 18 UUD 1945 berbunyi: “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.”<sup>32</sup>

#### B. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

##### 1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.<sup>33</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia N0. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pendapatan asli daerah yaitu

<sup>32</sup> Sudono Syueb, *Dinamika Hukum Pemerintahan Daerah Sejak Kemerdekaan Sampai Era Reformasi*, Jakarta : Laksbang Mediatama, 2008, h. 30.

<sup>33</sup> Rudy Badrudin, *Ekonomi Otonomi Daerah*, Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2011, h.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.<sup>34</sup>

Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada. Semakin besar komposisi pendapatan asli daerah, maka semakin pula kemampuan pemerintah daerah untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar. Tetapi semakin kecil komposisi pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah maka ketergantungan terhadap pusat semakin besar. Sedangkan dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah adalah kelancaran pembangunan. Pembangunan meliputi berbagai sektor diantaranya adalah pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lainnya.

#### 2. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu

<sup>34</sup> Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2011, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2011, h.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintah daerah.

Sebagaimana dengan Negara, maka daerah dimana masing-masing pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan pembangunan disegala bidang. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam daerah yang bersangkutan, yang terdiri:<sup>35</sup>

a. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>36</sup> Jenis pajak yang terdapat di kabupaten /kota terdiri dari:

- 1) Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga, hotel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan

<sup>35</sup> Yuliati, *Akutansi Sektor Publik Cetakan Kelima*, Jakarta : Salemba Empat, 2000, h. 97.

<sup>36</sup> Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*, Jakarta : Rajawali P, 2014, h. 393.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).<sup>37</sup>

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Yang dimaksud dengan jasa penunjang adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.<sup>38</sup>

Mengacu Pendapatan Asli Daerah ketentuan Pasal 32 ayat UU 28 Tahun 2009 tersebut, apabila ada fasilitas hiburan yang menyatu sebagai fasilitas hotel, seperti diskotek, spa, fitness center dll, maka dapat dikenakan pajak hotel. Sedangkan pendapat terjadi antara pemerintahan daerah sebagai fiskus dengan pengusaha hotel yang terdapat fasilitas hiburan yang disebabkan tarif pajak hiburan dapat dikenakan sampai 75% sedangkan pajak hotel hanya dapat dikenakan maksimal 10%.<sup>39</sup>

- 2) Pajak Restoran pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang

<sup>37</sup> Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, Undang-Undang Pemerintah Daerah, Yogyakarta : Pustaka Mahardika, 2015, h. 24.

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 25.

<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 25.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.<sup>40</sup>

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikondisikan oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain. Berdasarkan ketentuan ini, maka layanan antar (delivery service) atau pemesanan dibawa (take away order), tetap dikenakan pajak restoran walaupun tidak menikmati fasilitas sarana restoran.<sup>41</sup>

#### 3) Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.<sup>42</sup>

Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Bentuk hiburan yang dikenakan pajak adalah terbatas Pendapatan Asli Daerah.<sup>43</sup>

#### 4) Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial

<sup>40</sup> *Ibid.*, h. 25.

<sup>41</sup> *Ibid.*, h. 25.

<sup>42</sup> Rahardja Adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta : Graha, 2011,

<sup>43</sup> *Ibid.*, h. 90.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperkenalkan, mengajukan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.<sup>44</sup>

- 5) Pajak Penerangan Jalan adalah pajak yang dipungut dari hasil penggunaan tenaga listrik. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari lain. Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik.<sup>45</sup>

Yang dimaksud penggunaan tenaga listrik dari sumber lain adalah konsumen memperoleh tenaga listrik yang didistribusikan dari penyedia tenaga listrik, diantaranya yaitu PLN. Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga listrik diperoleh tenaga listrik dari pembangkit listrik yang dimiliki dan dioperasikan secara mandiri oleh pengguna tenaga listrik. Pusat perbelanjaan, toko swalayan, mall, rumah sakit, hotel dan gedung-gedung yang biasa dikunjungi masyarakat luas banyak menggunakan generator set (genset) sebagai sumber listrik cadangan saat pemadaman listrik terjadi.<sup>46</sup>

- 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan
- 7) Pajak Parkir

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, h. 90.

<sup>45</sup> *Ibid.*, h. 90.

<sup>46</sup> *Ibid.*, h. 90.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Retribusi daerah

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.<sup>47</sup> Retribusi daerah dibagi tiga golongan:

a. Retribusi jasa umum

Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Obyek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.<sup>48</sup>

b. Retribusi jasa usaha Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah:

1) Perizinan Tertentu

Obyek Retribusi perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau kelestarian lingkungan.

<sup>47</sup> *Ibid.*, h. 90.

<sup>48</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta : Penerbit Andi, 2011, h. 16.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 2) Perusahaan daerah

Pemerintahan daerah juga diberikan hak untuk mengelola perusahaan sendiri sebagai salah satu sumber pendapatan yang disebut perusahaan daerah. Sifat perusahaan daerah sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan adalah kesatuan produksi untuk menambah penghasilan daerah, member jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan mengembangkan perekonomian daerah.<sup>49</sup>

Prinsip pengelolaan perusahaan daerah tentunya harus tetap berdasarkan tujuan ekonomis perusahaan yaitu mencari keuntungan. Dari situlah keuntungan itulah sebagai disetorkan kepada kas daerah. Perusahaan daerah dapat beroperasi dalam bidang konstruksi, transportasi, pembuatan barang dan lain sebagainya. Perusahaan daerah digolongkan dalam tiga macam, yaitu:

- a) Perusahaan yang diperoleh berdasarkan penyerahan dari pemerintah berupa perusahaan yang berasal dari nasional perusahaan asing.
- b) Perusahaan yang berasal dari perusahaan Negara yang diserahkan kepada pemerintah daerah.
- c) Perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah dengan modal seluruh atau sebagian merupakan milik daerah.

<sup>49</sup> Supriatna, *Op. Cit.*, h. 195.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu maksud yang didirikan perusahaan daerah adalah didasarkan pada pelayanan dan pemberian jasa kepada masyarakat. Namun bukan berarti bahwa perusahaan tidak memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah. Perusahaan daerah mempunyai dua fungsi yang berjalan secara bersamaan, dimana satu pihak dituntut untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi sosial, yaitu memberikan pelayanan dan jasa kepada masyarakat dan pihak lain. Perusahaan daerah menjalankan fungsi ekonomi yaitu memperoleh keuntungan dari kinerja. Keuntungan yang didapat inilah yang disebut dengan laba bagian badan usaha milik daerah.

Laba bagian Badan Usaha Milik Daerah ialah bagian keuntungan atau laba bersih dari perusahaan daerah atas badan lain yang merupakan badan usaha milik daerah. Keuntungan inilah yang diharapkan dapat member sumbangan bagi pendapatan asli daerah, walaupun sampai saat ini kontribusi yang diberikan dari sektor perusahaan daerah masih relative kecil bila dibandingkan dengan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

#### 3) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pajak daerah dan retribusi merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

salah satu sumber pembiayaan pemerintah daerah dan pembangunan daerah yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan daerah. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ini diharapkan akan memperlancar jalannya pembangunan dan pemerintahan daerah. Pembangunan dapat berjalan dengan lancar maka peluang untuk kesejahteraan masyarakat diharapkan akan meningkat.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah selain pajak, retribusi dan perusahaan daerah adalah lain-lain hasil usaha daerah lain yang sah. Lain-lain usaha daerah yang sah merupakan usaha daerah (bukan usaha perusahaan daerah) dapat dilakukan oleh satu aparat pemerintahan daerah (dinas) yang dalam kegiatannya menghasilkan suatu barang atau jasa dapat dipergunakan oleh masyarakat dengan ganti rugi.<sup>50</sup>

Pendapatan dari sektor ini berbeda untuk masing-masing daerah tergantung potensi yang dimilikinya, walaupun sumbangan sektor ini masih terbatas tetapi dibandingkan dengan laba perusahaan daerah dan penerimaan dari dinas-dinas daerah, sektor ini lebih baik dalam memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah dan relative merata untuk tiap-tiap daerah. Usaha daerah sebagai sumber

---

<sup>50</sup> Supriatna, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 1993, h. 198.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapatan daerah tersebut harus disetorkan kepada kas daerah dan diatur dalam peraturan daerah. Penerimaan ini mencakup sewa rumah daerah, sewa gedung dan tanah milik daerah, jasa giro, hasil penjualan barang-barang, bekas milik daerah pendapatan hasil eksekusi dan jaminan, denda pajak, dan penerimaan-penerimaan lain yang sah menurut undang-undang.<sup>51</sup>

#### Pajak

Sebagaimana diketahui bahwa sektor pajak merupakan pemasukan bagi negara yang terbesar demikian juga halnya dengan daerah. Sejak dikeluarkannya kebijakan mengenai otonomi daerah, maka daerah saat ini senantiasa berpacu untuk meningkatkan pendapatan daerah, salah satunya adalah pada sektor pajak yang macamnya berbeda-beda sesuai dengan ketentuan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu pendapatan asli daerah adalah disektor pajak daerah, yang pengaturan melalui undang-undang, dan dalam pelaksanaannya diatur melalui peraturan daerah (Perda). Penghasilan daerah melalui sektor pajak merupakan sektor yang paling dominan untuk menopang pembangunan daerah, untuk itu dalam penggunaannya senantiasa diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

---

<sup>51</sup> Yuhana, *Op. Cit.*, h. 20.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa, dan uang pajak tersebut harus digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Secara umum pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.<sup>52</sup>

<sup>52</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, h. 1.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **D. Hukum Pajak**

Hukum pajak sering juga disebut hukum fiskal. Istilah hukum fiskal digunakan oleh beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Istilah pajak sering disamakan dengan istilah fiskal. Sekarang istilah fiskal dimaksudkan adalah kas negara. Karena kas negara hanya dapat terisi dengan uang yang diperoleh dari rakyat, maka fiscus disamakan dengan bagian yang mengurus penerimaan negara yang sekarang lazim disebut administrasi pajak.

Hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Dengan lain perkataan hukum pajak menerangkan :

1. Siapa-siapa wajib pajak (subjek pajak);
2. Objek-objek apa yang dikenakan pajak (objek pajak);
3. Kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah;
4. Timbulnya dan hapusnya hutang pajak;
5. Cara penagihan pajak, dan
6. Cara mengajukan keberatan dan banding pada peradilan pajak.<sup>53</sup>

### **Pajak Daerah**

Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 1 ayat (10) menyebutkan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib bagi yang terutang oleh pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan

<sup>53</sup> Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014, h. 28.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>54</sup>

Selanjutnya, jenis pajak daerah diatur dalam Pasal 2 yang menyebutkan jenis pajak provinsi dan jenis pajak kabupaten/kota.

#### 1. Jenis pajak provinsi

- a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

Jenis-jenis pajak daerah tingkat I ditetapkan sebanyak empat jenis pajak. Walaupun demikian, daerah tingkat I dapat tidak memungut salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan bagi daerah tingkat I tersebut apabila potensi pajak di daerah tersebut dipandang kurang memadai.

#### 2. Jenis pajak kabupaten/kota

- a. Pajak hotel dan restoran
- b. Pajak hiburan
- c. Pajak reklame
- d. Pajak penerangan jalan
- e. Pajak pengambilan bahan galian golongan C
- f. Pajak parkir

<sup>54</sup> Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jenis-jenis pajak daerah tingkat II ditetapkan sebanyak tujuh jenis pajak. Walaupun demikian, daerah tingkat II dapat tidak memungut salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan bagi daerah tingkat II tersebut apabila potensi pajak di daerah tersebut dipandang kurang memadai.

Dengan peraturan daerah, dapat ditetapkan jenis pajak kabupaten/kota selain yang ditetapkan dalam angka (2) yang memenuhi kriteria diantaranya :

- a. Bersifat pajak dan bukan retribusi;
- b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
- d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan objek pajak pusat;
- e. Potensinya memadai;
- f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;
- g. Memerhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan
- h. Menjaga kelestarian lingkungan.<sup>55</sup>

<sup>55</sup> Agus Setiawan, Basri Musri, *Perpajakan Umum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006, h. 350-352.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### F. Fungsi Pajak

Ada dua macam fungsi pajak, yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi penerimaan (budgetair), yaitu pajak berfungsi sebagai sumber pendanaan untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah guna kepentingan umum.
2. Fungsi mengatur (regulerend), yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.<sup>56</sup>

### G. Sistem Pemungutan Pajak

1. Sistem Self Assesment

Dalam sistem self assessment, wajib pajak memiliki hak yang tidak boleh diintervensi oleh pejabat pajak, kecuali hanya memberikan pelayanan dengan cara bagaimana wajib pajak menggunakan hak tersebut. Sistem self assessment mengandung konsekuensi terhadap pejabat pajak dan wajib pajak dalam kaitan penerapannya.

Pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak daerah hanya bersifat pasif dan wajib pajak bersifat aktif. Keaktifan wajib pajak adalah untuk menghitung, memperhitungkan, melaporkan, dan menyetor jumlah pajak yang terutang.

Keaktifan wajib pajak sangat dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban berupa mengisi secara benar, jelas, lengkap, dan

<sup>56</sup> Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, h.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menandatangani surat pemberitahuan, baik surat pemberitahuan masa maupun surat pemberitahuan tahunan sebagai sarana hukum untuk menghitung, memperhitungkan, melaporkan, dan menyeter pajak yang terutang. Sebaliknya, pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pejabat pajak yang mengelola pajak daerah hanya sekedar memberikan bimbingan agar wajib pajak memenuhi kewajiban dan menjalankan hak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.<sup>57</sup>

#### 2. Sistem Official Assessment

Menurut sistem official assessment, pejabat pajak memiliki wewenang dalam menentukan jumlah pajak yang wajib dibayar lunas oleh wajib pajak. Campur tangan pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak daerah dalam penentuan pajak yang terutang bagi wajib pajak tidak dapat terhindarkan karena sistem ini menitikberatkan pada keterlibatan pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau mengelola pajak daerah dalam upaya menerbitkan ketetapan pajak yang berisikan utang pajak dan bahkan kalau perlu memuat sanksi hukum.

Penerapan sistem official assessment dalam undang-undang pajak dapat dilihat pada pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang memberi kepercayaan kepada pejabat pajak untuk menentukan pajak yang wajib dibayar lunas oleh wajib pajak terhadap objek pajak bumi dan

<sup>57</sup> Muhammad Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014, h.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bangunan pedesaan dan perkotaan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkannya.

#### 3. Sistem Semi Self Assessment

Berdasarkan sistem semi self assessment, bahwa ada kerja sama antara wajib pajak dengan pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak daerah untuk menentukan jumlah pajak yang wajib dibayar lunas oleh wajib pajak kepada negara.

Sistem semi self assessment sebagai salah satu sistem pemungutan pajak yang dikenal dalam hukum pajak, tetapi kenyataannya tidak diterapkan dalam undang-undang pajak. Sistem semi self assessment memiliki tingkat kesulitan yang tinggi dan bahkan dapat menimbulkan kompromi pajak antara wajib pajak dengan pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau mengelola pajak daerah pada akhir tahun pajak.

#### 4. Sistem With Holding

Sistem with holding memberi kepercayaan kepada pihak ketiga untuk melakukan pemungutan pajak atas objek pajak yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Dengan kata lain, pihak ketiga ditempatkan sebagai pihak yang berwenang untuk memotong pajak atau memungut pajak tertentu dan menyetor serta melaporkan kepada pejabat yang bertugas mengelola pajak pusat atau mengelola pajak daerah.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penerapan sistem with holding dalam undang-undang pajak dapat dilihat pada pajak penghasilan Pasal 21. Juga dalam pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, bea materai, serta bea masuk dan bea cukai.<sup>58</sup>

#### D. Dana Perimbangan

Dalam rangka menciptakan suatu sistem perimbangan keuangan yang professional, demokratis, adil, dan transparan berdasarkan atas pembagian pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah, maka diundangkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang tersebut antara lain mengatur tentang dana perimbangan yang merupakan aspek penting dalam sistem perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dana perimbangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada Pasal 1 ayat (19) yang menyebutkan Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.<sup>59</sup> Hal ini untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

<sup>58</sup> *Ibid.*, h. 161.

<sup>59</sup> Pasal 1 ayat (19) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dana perimbangan terdiri dari :

- a. Bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam;
- b. Dana alokasi umum;
- c. Dana alokasi khusus.<sup>60</sup>

#### Perimbangan Keuangan Di Daerah

Perimbangan keuangan tidak hanya terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tetapi juga antara pemerintah daerah tingkat I (pemerintah provinsi) dan pemerintah daerah tingkat II (pemerintah kabupaten dan kota). Dana perimbangan ini terdiri dari dana bagi hasil dan dana alokasi umum serta alokasi khusus.

##### 1. Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana bagi hasil terdiri dari pajak kendaraan bermotor (PKB), biaya balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB), dan pajak air permukaan.

Bagi hasil pajak merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kebijakan

<sup>60</sup> H.A.W, Widjaya, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007, h. 129.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perimbangan keuangan, sebagai bagian dari skema desentralisasi fiskal memiliki paling kurang dua target utama, yakni mencukupkan pembiayaan daerah dalam mengurus limpahan kewenangan yang diterimanya dan pemeratakan kapasitas fiskal antar daerah berdasar derajat kebutuhan masing-masing.

Pendapatan pajak pusat dan pajak daerah (pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota) memiliki selisih yang besar. Selisih tersebut dikarenakan pemungutan jenis-jenis pajak dengan pendapatan besar masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sebagai upaya untuk mengurangi ketimpangan vertikal yang terjadi antara pusat dan daerah, maka dilakukan sistem bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak antara pusat dan daerah. Pendapatan pajak provinsi setiap tahun yang dipungut dari masing-masing kabupaten/kota dibagikan berdasarkan persentase yang telah ditentukan. Persentase bagi hasil pajak provinsi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel III.1**  
**Pembagian Pendapatan Pajak Provinsi**

Jenis pajak	Pemerintah kabupaten/kota	Pemerintah provinsi	
		Pemerataan	Potensi
Pajak kendaraan bermotor	30%	30%	70%
Bea balik nama kendaraan bermotor	30%	30%	70%
Pajak bahan bakar kendaraan bermotor	70%	20%	80%
Pajak air permukaan	50% 80% *)	50%	50%

Sumber : Perda Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011

\*) Khusus untuk pendapatan pajak air permukaan dari sumber air yang berada hanya pada I (satu) wilayah kabupaten/kota.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil pendapatan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sebesar 10% termasuk yang dibagihasikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum. Alokasi pendapatan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sebesar 10% diharapkan dapat meminimalkan terjadi kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan karena kerusakan jalan dan sarana prasarana jalan.

Pembagian sumber keuangan yang berasal dari bagi hasil tersebut adalah sebagaimana yang diuraikan dibawah ini :

- a. Penerimaan dari hasil hutan yang diterima oleh pemerintah daerah (yaitu 80% bagian daerah) dari iuran hasil hutan (IHH) didistribusikan untuk propinsi (16%) dan untuk kabupaten/kota (64%). Sedangkan 80% bagian daerah yang diperoleh dari propinsi sumber daya hutan, 16% dialokasikan untuk propinsi, 32% untuk kabupaten/kota penghasil dan 32% untuk kabupaten/kota lainnya dalam propinsi yang sama.
- b. Bagian penerimaan dari hasil pertambangan umum yang diterima oleh pemerintah daerah (sebesar 80% sebagai penerimaan iuran tetap), dibagi 16% untuk pemerintah propinsi, 32% untuk pemerintah kabupaten penghasil dan 32% sisanya untuk pemerintah kabupaten/kota lainnya.
- c. Kemudian penerimaan dari hasil minyak bumi sebesar 15% yang diterima pemerintah daerah dibagi 3% untuk pemerintah propinsi, 6%

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk pemerintah kabupaten/kota penghasil, dan 6% lainnya untuk pemerintah kabupaten/kota lainnya.

- d. Akhirnya penerimaan dari gas alam yang memberikan bagian sebesar 30% untuk pemerintah di daerah dibagi lagi 6% untuk pemerintah propinsi, 12% untuk pemerintah kabupaten/kota penghasil dan 12% untuk pemerintah kabupaten/kota lainnya.<sup>61</sup>
2. Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran rangka pelaksanaan desentralisasi. Penggunaan dana alokasi umum ini ditetapkan sepenuhnya oleh daerah. Termasuk didalam pengertian pemerataan kemampuan keuangan daerah adalah jaminan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah diseluruh daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan merupakan satu kesatuan dengan penerimaan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Penggunaan dana alokasi umum dan penerimaan umum lainnya dalam APBD harus tetap dalam kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, seperti pelayanan dibidang kesehatan dan pendidikan.

Besarnya dana alokasi umum ditetapkan sekurang-kurangnya dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. Yang

---

<sup>61</sup> Suparmoko, *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah Edisi Pertama*, Yogyakarta : Andi, 2002, h. 45.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimaksudkan dengan penerimaan dalam negeri adalah penerimaan negara yang berasal dari pajak dan bukan pajak setelah dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada daerah.

DAU ini merupakan seluruh alokasi umum untuk daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota. Kenaikan dana alokasi umum akan sejalan dengan penyerahan dan pengalihan kewenangan pemerintah dan pengalihan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka desentralisasi.<sup>62</sup>

#### 3. Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Dana alokasi khusus merupakan bagian dari dana perimbangan sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana alokasi khusus dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. Yang dimaksudkan sebagai daerah tertentu adalah daerah-daerah yang mempunyai kebutuhan yang bersifat khusus. Pengalokasian dana alokasi khusus memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN berarti bahwa besaran dana alokasi khusus tidak dapat dipastikan setiap tahunnya.

<sup>62</sup> Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004, h. 110.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dana alokasi khusus dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan usulan daerah yang berisi usulan-usulan kegiatan dan sumber-sumber pembiayaannya yang diajukan kepada Menteri Teknis oleh daerah tersebut. Bentuknya dapat berupa rencana suatu proyek atau kegiatan tertentu atau dapat berbentuk dokumen program rencana pengeluaran tahunan dan multi tahunan untuk sektor-sektor serta sumber-sumber pembiayaannya.

Dalam hal sektor/kegiatan yang diusulkan oleh daerah termasuk dalam kebutuhan yang tidak dapat diperhitungkan maka daerah perlu membuktikan bahwa daerah kurang mampu membiayai seluruh pengeluaran usulan kegiatan tersebut dari pendapatan asli daerah, bagian daerah dari pajak bumi dan bangunan, bagian daerah dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, bagian daerah dari penerimaan sumber daya alam, dana alokasi umum, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah, yang penggunaannya dapat ditentukan sepenuhnya oleh daerah.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, h. 126.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### Kesimpulan

Dari uraian diatas penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Realisasi Target Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Peraturan Gubernur Propinsi Riau Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Propinsi Riau. Realisasi dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor dilakukan oleh pemerintah Provinsi Riau dengan cara memungut hasil pajak kendaraan bermotor melalui SAMSAT/UPT Pendapatan Provinsi Riau di Kabupaten Tembilahan Kelas A kemudian dana wajib pajak tersebut menjadi sumber dana penerimaan daerah yang wajib dibagi hasil antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Diantara dinas daerah yang diberi kewenangan otonom adalah Badan Pendapatan Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya berupaya untuk menggali sumber daya yang ada di daerah, di antaranya adalah melakukan penerimaan terhadap pajak kendaraan bermotor dan yang melakukan pemungutan terhadap pajak kendaraan bermotor melalui wajib pajak kendaraan bermotor dilakukan oleh sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT).
2. Hambatan Tidak Tercapainya Realisasi dari Target Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Indragiri Hilir adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, kurang transparan atau

keterbukaan bagi wajib pajak, faktor ekonomi yang menurun, kurangnya sosialisasi instansi terkait, dan tidak terdatanya kendaraan yang rusak.

### **Saran**

Sehubungan dengan pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir harus benar-benar dapat melaksanakan tugas untuk menggali sumber daya yang ada di daerah, di antaranya adalah melakukan penerimaan terhadap pajak kendaraan bermotor dan yang melakukan pemungutan terhadap pajak kendaraan bermotor melalui wajib pajak kendaraan bermotor dilakukan oleh sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT). Dan harus menggunakan uang pajak tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni untuk kesejahteraan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk pembangunan.
2. Kepada masyarakat khususnya wajib pajak harus mempunyai kesadaran sebagai warga negara Indonesia yang baik harus taat dalam membayar pajak sebagai wujud nyata dari penghasilan yang diperoleh melalui izin yang dikeluarkan oleh instansi yang terkait, maka konsekuensi dari hal tersebut pemilik kendaraan bermotor wajib melakukan pembayaran terhadap pajak yang terhutang sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abu Samah, *Memahami Hukum Pajak di Indonesia*, Pekanbaru: Uin Suska, 2016.
- Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Agus Setiawan, Basri Musri, *Perpajakan Umum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan di Indonesia Keuangan Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Burhan Ashshofah, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.
- Dioko Mulyono, *Hukum Pajak*, Yogyakarta: Andi, 2010.
- H.A.W, Widjaya, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Kompunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, Undang-Undang Pemerintah Daerah, Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2015.
- Kajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011.
- Imly Asshiddiqie, *Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi, 2009.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- \_\_\_\_\_, *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011.
- Muhammad Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Rahardja Adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta: Graha, 2011.
- Rady Badrudin, *Ekonomi Otonomi Daerah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011.
- Safrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Sudono Syueb, *Dinamika Hukum Pemerintahan Daerah Sejak Kemerdekaan Sampai Era Reformasi*, Jakarta: Laksbang Mediatama, 2008.
- Suparmoko, *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah Edisi Pertama*, Yogyakarta: Andi, 2002.
- Supriatna, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1993.
- Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014..
- Wirawan B. Ilyas, Richart Burton, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Yuliati, *Akutansi Sektor Publik Cetakan Kelima*, Jakarta: Salemba Empat, 2000.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se- Provinsi Riau.

## JURNAL DAN LAINNYA

<http://riau.bps.go.id>

<http://kbbi.web.id/perintah>. diunduh pada tanggal 11 Juli 2019

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Daftar Pertanyaan Wawancara**

Kepala Samsat/UPT Kabupaten Indragiri Hilir Kecamatan Tembilahan Kota

1. Apakah Bapak mengetahui adanya Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau ?
2. Apa saja peranan dari pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Indragiri Hilir ?
3. Bagaimana realisasi target dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2014-2018 ?
4. Apakah jumlah penerimaan pajak khususnya pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Indragiri Hilir setiap tahunnya mengalami kenaikan ?
5. Apa yang mengakibatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Indragiri Hilir dari tahun ke tahun mengalami penurunan ?
6. Apa saja faktor penghambat tidak tercapainya realisasi dari target dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Indragiri Hilir ?

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Daftar Pertanyaan Wawancara**  
Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan  
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

1. Apakah Ibu mengetahui adanya Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau ?
2. Apa saja peranan dari pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Indragiri Hilir ?
3. Bagaimana realisasi target dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2014-2018 ?
4. Apakah jumlah penerimaan pajak khususnya pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Indragiri Hilir setiap tahunnya mengalami kenaikan ?
5. Apa yang mengakibatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Indragiri Hilir dari tahun ke tahun mengalami penurunan ?
6. Apa saja faktor penghambat tidak tercapainya realisasi dari target dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Indragiri Hilir ?



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Daftar Pertanyaan Wawancara**

Subbidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah  
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

1. Apakah Bapak mengetahui adanya Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau ?
2. Apa saja peranan dari pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Indragiri Hilir ?
3. Bagaimana realisasi target dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2014-2018 ?
4. Apakah jumlah penerimaan pajak khususnya pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Indragiri Hilir setiap tahunnya mengalami kenaikan ?
5. Apa yang mengakibatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Indragiri Hilir dari tahun ke tahun mengalami penurunan ?
6. Apa saja faktor penghambat tidak tercapainya realisasi dari target dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Indragiri Hilir ?

UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daftar Pertanyaan Wawancara  
Kepala Bidang Pembukuan, Pelaporan, Verifikasi dan bagihasil  
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

1. Apakah Bapak mengetahui adanya Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau ?
2. Apa saja peranan dari pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Indragiri Hilir ?
3. Bagaimana realisasi target dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2014-2018 ?
4. Apakah jumlah penerimaan pajak khususnya pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Indragiri Hilir setiap tahunnya mengalami kenaikan ?
5. Apa yang mengakibatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Indragiri Hilir dari tahun ke tahun mengalami penurunan ?
6. Apa saja faktor penghambat tidak tercapainya realisasi dari target dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Indragiri Hilir ?



Daftar Pertanyaan Wawancara  
Subbidang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak  
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

1. Apakah Bapak mengetahui adanya Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau ?
2. Apa saja peranan dari pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Indragiri Hilir ?
3. Bagaimana realisasi target dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2014-2018 ?
4. Apakah jumlah penerimaan pajak khususnya pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Indragiri Hilir setiap tahunnya mengalami kenaikan ?
5. Apa yang mengakibatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Indragiri Hilir dari tahun ke tahun mengalami penurunan ?
6. Apa saja faktor penghambat tidak tercapainya realisasi dari target dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Indragiri Hilir ?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**SALINAN**

## GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR  
NOMOR : **30** TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK  
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 55 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 4).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI RIAU.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Riau.
2. Gubernur adalah Gubernur Riau sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Provinsi Riau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau.
6. Badan Pendapatan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

9. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
10. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari realisasi penerimaan Pajak Daerah berupa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), dan Pajak Air Permukaan yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk Kabupaten/Kota dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA/DPPA, adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas nama Gubernur dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran daerah dan pencairan dana atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
13. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.

## BAB II SUMBER DANA BAGI HASIL

### Pasal 2

- (1) Dana Bagi Hasil bersumber dari APBD dan/atau Perubahan APBD Provinsi.
- (2) Dana Bagi Hasil diberikan melalui penerbitan DPA/DPPA Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran berkenaan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Dana Bagi Hasil diberikan dan merupakan bagian dari pendapatan yang dianggarkan dalam APBD dan/atau Perubahan APBD Kabupaten/Kota.
- (4) Dana Bagi Hasil ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek potensi dan/atau pemerataan Kabupaten/Kota.

### Pasal 3

- (1) Dana Bagi Hasil diberikan kepada Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten / Kota sebesar 30% (tiga puluh persen);

- b. Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
  - c. Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 50% (lima puluh persen);
  - d. Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (2) Penetapan alokasi Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### BAB III MEKANISME PENYALURAN TRANSFER DANA BAGI HASIL

#### Pasal 4

- (1) Penyaluran Dana Bagi Hasil dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berkenaan;
- (2) Penyaluran Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) di atur dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Penyaluran Triwulan I dengan porsi sebesar 15 % (lima belas persen) dari penetapan perhitungan bagi hasil.
  - b. Penyaluran Triwulan II dengan porsi sebesar 20 % (dua puluh persen) dari penetapan perhitungan bagi hasil.
  - c. Penyaluran Triwulan III dengan porsi sebesar 20 % (dua puluh persen) dari penetapan perhitungan bagi hasil.
  - d. Penyaluran Triwulan IV untuk bulan Oktober dan November dihitung berdasarkan realisasi, sedangkan untuk bulan Desember disalurkan pada Bagi Hasil tahun berikutnya.
- (3) Dalam hal terjadi kekurangan penyaluran dana bagi hasil, kekurangan tersebut diperhitungkan dalam penyaluran berikutnya, dan jika terjadi kelebihan penyaluran dana bagi hasil, kelebihan tersebut menjadi faktor pengurang pada penyaluran berikutnya.

#### Pasal 5

- (1) Untuk penyaluran transfer Dana Bagi Hasil, Kabupaten/Kota wajib menyampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dokumen sebagai berikut :
  - a. Asli rekening Koran dari Rekening Kas Umum Daerah.
  - b. Petikan Keputusan Bupati/Walikota mengenai penunjukan/penetapan pejabat Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah (legalisir oleh Kepala Bagian Hukum Kabupaten/Kota).
- (2) Dalam hal terdapat perubahan nomor rekening, nama rekening dan nama bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kabupaten/Kota menyampaikan perubahan tersebut dengan surat Bupati/Walikota melampirkan asli rekening Koran dan petikan Keputusan Bupati/Walikota mengenai penunjukan/penetapan pejabat Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah (legalisir oleh Kepala Bagian Hukum Kabupaten/Kota).



## Pasal 6

Penyaluran Dana Bagi Hasil dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Penyaluran Dana Bagi Hasil dilakukan setiap Triwulan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan-Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;
- c. Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilengkapi dengan dokumen antara lain:
  1. Keputusan Gubernur tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Provinsi kepada Kabupaten/Kota;
  2. Surat Pengantar Permintaan Transfer Dana Bagi Hasil dari Kepala Badan Pendapatan Daerah;
  3. Surat Penyediaan Dana (SPD);
  4. Laporan Penerimaan Transfer Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota Triwulan sebelumnya;
  5. Fotocopy Rekening Koran dari Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota;
  6. Fotocopy Keputusan Bupati/Walikota mengenai Penunjukan Pejabat BUD/Kuasa BUD;
  7. Khusus untuk penyaluran Triwulan IV dilengkapi dengan berita acara hasil rekonsiliasi atas pengeluaran dana bagi hasil Triwulan I s/d Triwulan III dengan Kabupaten/Kota.

## Pasal 7

- (1) Untuk pelaksanaan transfer dana bagi hasil ke Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan SPM sebagai perintah pembayaran.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi.
- (3) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah untuk melakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Tata cara penerbitan SPM dan SP2D dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 8

- (1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mengirimkan surat permintaan konfirmasi atas penyaluran dana bagi hasil ke Daerah kepada masing-masing Bupati/Walikota, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dana bagi hasil tersebut masuk ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota;

- (2) Bupati/Walikota menyampaikan jawaban atas permintaan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah permintaan konfirmasi tersebut diterima;
- (3) Format Jawaban atas permintaan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### BAB IV PENUTUP

##### Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal **5 Mei 2017**

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal **5 Mei 2017**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

H. AHMAD HILALI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2017 NOMOR : 31

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
di  
Rt. Kepala Biro Hukum  
Kabag. Dokumentasi, Fasilitasi Dan Evaluasi



**WARDHANI, SH. MH**  
Pembina  
NIP.19650823 199203 2 003

KOP SURAT

Nomor Surat Pengantar :

LEMBAR KONFIRMASI TRANSFER KE DAERAH

Telah diterima dari : Pemerintah Provinsi Riau

Melalui Bank ..... sejumlah : Rp.

Terbilang :

Untuk Keperluan : Pencairan Anggaran Transfer ke Daerah TA 201..  
Bulan :  
Daerah :

Dengan Rincian :

DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH	Jumlah	Diterima Tanggal
Penyaluran Transfer Melalui Bank .....		
Tri Wulan ke ..... Tahun .....		
- DBH Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		
- DBH Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)		
- DBH Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)		
- DBH Pajak Air Permukaan		
JUMLAH TOTAL PENERIMAAN TRANSFER		

Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Daerah sebagai berikut :

Nomor Rekening : .....  
Nama Rekening : .....  
Nama Bank : .....

....., ..... 201...

Bupati/Walikota

Kode Pemda : .....  
.....

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. [www.fasih.uin-suska.ac.id](http://www.fasih.uin-suska.ac.id) Email : [fasih@uin-suska.ac.id](mailto:fasih@uin-suska.ac.id)

## SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/4530/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ROBBY SUANDI  
N I M : 11527100070  
Jurusan : ILMU HUKUM

Telah Lulus :

## UJIAN KOMPREHENSIF

Yang diselenggarakan pada tanggal : 16 APRIL 2019

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 15 Mei 2019

Dekan,



Drs. F. Hajar, M. Ag  
NIP. 195807121986031005



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-561645  
Fax. 0761-562052 Web: <http://fasih.uin-suska.ac.id>, E-mail : [fsihuinriau@gmail.com](mailto:fsihuinriau@gmail.com)

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3011/2019  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 27 Maret 2019

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ROBBY SUANDI  
NIM : 11527100070  
Jurusan : Ilmu Hukum S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : 1. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir  
2. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
:Realisasi Target Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Indragiri Hilir  
Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Tata Cara  
Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

  
Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag.  
NIP. 19580712 198603 1005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul "Realisasi Target Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau", ditulis oleh saudara :

Nama : ROBBY SUANDI  
NIM : 11527100070  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Diseminarkan pada :  
Hari / Tanggal : KAMIS / 21 MARET 2019  
Narasumber : MUSRIFAH, SH, MH

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

ASFENDI, S.Ag. M.Si  
NIP. 1961091819880311002

Pekanbaru, 25 Maret 2019  
Narasumber

MUSRIFAH, SH, MH  
NIK. 130 217 039



**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul, "REALISASI TARGET DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI RIAU NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI RIAU" yang ditulis oleh :

Nama : ROBBY SUANDI  
NIM : 11527100070  
Program Studi : ILMU HUKUM

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/ Tanggal : Kamis / 12 September 2019

Waktu : 14.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Oktober 2019  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Dr. Drs. Heri Sunandar, MCL**

Sekretaris

**Roni Kurniawan, SH., MH**

Penguji 1

**Lovelly Dwina Dahan, SH., MH**

Penguji 2

**Hj. Nuraini Sahu, SH., MH**



Mengetahui,  
Kepala Bagian Tata Usaha  
Fakultas Syariah dan Hukum



**Erni, S. Sos., MM**  
NIP. 19680226 199103 2 002

#### PENGESAHAN PEMBIMBING

**Dr. Maghfirah, MA**

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 26 Juli 2019

No : Nota Dinas

Lamp : -

Hal : Pengajuan Skripsi

Sdr. ROBBY SUANDI

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb*

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara ROBBY SUANDI, yang berjudul "**REALISASI TARGET DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI RIAU NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI RIAU**" dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhataianya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pembimbing

  
**Dr. H. Maghfirah, MA**

**NIP.197410252003121002**



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293  
Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com  
HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **ROBBY SUANDI**  
NIM : **11527100070**  
Jurusan : **ILMU HUKUM**  
Judul : **REALISASI TARGET DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BERDASARKAN  
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI RIAU NOMOR 30 TAHUN  
2017 TENTANG TATA CARA PENYALURAN DANA BAGI HASIL  
PAJAK KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI  
RIAU**  
Pembimbing : **Dr. H. Maghfirah., MA**  
Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah  
ditetapkan.

Pekanbaru, 04 Oktober 2019

An.Pimpinan Redaksi



**M. Alpi Syahrin. SH., MH., CP.**  
NIP. 198804302019031010





**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Hang Tuah No. 04 Telp. (0768) 21024 – Fax. (0768) 24001  
**TEMBILAHAN**

Tembilahan, 11 Mei 2019

Nomor : 876/BPD-SKRT/147  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : Pelaksanaan Penelitian

Yth. Kepada  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif  
Kasim Riau  
di -

**Pekanbaru**

Berdasarkan Surat Rekomendasi Penelitian dan Pengumpulan Data (survey) dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 070/BKBP-POLMAS/2019/123 tanggal 16 April 2019 dan surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMTSP/NonIzin-Riset/21008 Tanggal 1 April 2019 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data untuk bahan skripsi, bahwa :

Nama : **ROBBY SUANDI**

NIM : 11527100070

Program Studi / Jenjang : Ilmu Hukum / S1

Alamat : Pasar Teluk Kelasa Kec. Keritang.

Judul Penelitian : Realisasi Target Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau.

Lokasi Penelitian : Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhil

Benar bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan Penelitian dan Pengumpulan Data pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Demikianlah untuk dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,**  
  
**Hj. NURLIA**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641221 199303 2 011





PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Akasia No.01 Telephone ☎ (0768) 22904 Faximile (0768) 21383  
Tembilahan Kode Pos 29211

**REKOMENDASI PENELITIAN  
DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**

Nomor : 070/BKBP-POLMAS/2019/123

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/21008 Tanggal 1 April 2019, Tentang Pelaksanaan kegiatan **Riset** dan Pengumpulan Data Untuk Bahan **Skripsi**, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **ROBBY SUANDI**  
NIM : 11527100070  
Program studi/Jenjang : Ilmu Hukum/S1  
Alamat : Pasar Teluk Kelasa Kec. Keritang  
Judul Penelitian : **REALISASI TARGET DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI RIAU NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI RIAU**  
Lokasi Penelitian : **BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan penelitian selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 16 April s/d 16 Juli 2019.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilahan, 16 April 2019

a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Sekretaris,



**MARLIS SYARIF, S. Sos, MH**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19640310 198703 1 008

**Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;**

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Suka Riau di Pekanbaru



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU  
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/21008  
T E N T A N G



182010

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9//2019 Tanggal 27 Maret 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

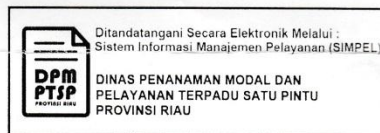
- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | <b>ROBBY SUANDI</b>   |
| 2. NIM / KTP         | : | 11527100070   |
| 3. Program Studi     | : | ILMU HUKUM  |
| 4. Jenjang           | : | S1  |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>REALISASI TARGET DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI RIAU NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI RIAU</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU<br>2. BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  |

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 1 April 2019



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*



**ROBBY SUANDI**, Lahir di Desa Teluk Kelasa, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau pada tanggal 4 Desember 1996. Penulis merupakan anak Pertama dari Dua bersaudara. Adik yang bernama Rita Susanti. Pasangan pernikahan dari Ayah yang bernama Nurdin dan Ibu Hariyati.

Pendidikan formal pertama yang ditempuh oleh Penulis adalah Sekolah Dasar yaitu SDN 012 Teluk Kelasa Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dan lulus pada tahun 2009. Kemudian, Penulis melanjutkan pendidikan di SMPN Satu Atap Teluk Kelasa dan lulus pada tahun 2012. Selanjutnya, Penulis melanjutkan pendidikan di MAN Tembilahan Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir dan lulus pada tahun 2015. Setelah itu, Penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Jurusan Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Hukum. Pada tahun 2017, Penulis telah melaksanakan magang di Kantor Pengadilan Agama Kelas II A Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir. Selanjutnya pada tahun 2018, Penulis melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir selama 2 bulan. Dan pada tahun 2019, Penulis melaksanakan penelitian Skripsi dengan judul “REALISASI TARGET DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI RIAU NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI RIAU”. Pada tanggal 12 September 2019 Penulis melaksanakan Ujian Munaqasyah/Skripsi dan dinyatakan “LULUS” dengan predikat sangat memuaskan. Dengan demikian,

Penulis berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH). Konsentrasi Hukum Tata Negara (HTN).

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

**Motto : “*Kamu Harus Menjadi Mata Air, Kalau Kamu Baik Pasti disekitarmu Akan Baik, Tapi Kalau Kamu Kotor Pasti disekelilingmu Akan Mati.*”**